

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan refleksi atau bagian dari kinerja organisasi publik. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten/kota yang melaksanakan penilaian kinerja organisasi publik secara baik, juga terus berupaya untuk dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahannya. Dalam mewujudkan kinerja tersebut, diperlukan pegawai yang memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi, dan memiliki kompetensi yang baik, serta menerapkan hal-hal yang menuju pemerintahan yang baik.

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini (Auditya. 2013).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantiarno, 2011).

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik :

- (1) Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum.
- (2) Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat.
- (3) Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Dikutip dari situs berita kompas.com pada tanggal 25 januari 2017 pada fenomena kali ini didasari pada informasi yang disampaikan oleh Mentri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAN – RB, yakni Asman Abnur menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) kepada pemerintah kabupaten/kota dalam regional satu wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat di Hotel Grand Panghegar, kota Bandung tahun 2017. Pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**( LHE-AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Regional Satu Wilayah**  
**Sumatera. Banten, Jawa Barat**  
**Di Hotel Grand Panghegar ( Bandung )**

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Jumlah Kab/Kota	Persentase (%)
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	-	-
2	A	> 80 – 90	Memuaskan	1	0,58
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	3	1,74
4	B	> 60 – 70	Baik	17	9,88
5	CC	> 50 – 60	Cukup	81	47,09
6	C	> 30 – 50	Kurang	69	40,12
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang	1	0,58
Total Pemerintah				172	100%

Sumber : Kompas. com

Menurut Penjabat (Pj) Bupati Syahril Abdi ia mengakui perlunya pembenahan dilingkungan Pemkab Kampar untuk meningkatkan kualitas atau pertanggungjawaban kinerjanya. Dan ia menegaskan, instansi harus memiliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat transparansi sehingga akan melahirkan pelayanan publik yang baik, berkinerja tinggi, berkompeten dan pembiayaan efisien.

Dalam berita ini tingkat akuntabilitas sebagian besar pemerintah daerah masih rendah, karna menurut menteri PAN-RB Asman Abdul untuk menciptakan akuntabilitas kinerja disuatu instansi harus memiliki tata kelola yang baik serta berorientasi hasil. Dan (Pj) Bupati Syahrial Abdi ia mengakui perlunya pembenahan dilingkungan pemkab kampar untuk meningkatkan kualitas atau pertanggungjawaban kinerjanya. Dapat dilihat ditabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	100%
2	Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Zona Integritas / Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	3 OPD	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Sumber : LAKIP Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2017

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan negara. (Yuda. 2011). Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah berupaya menerapkan prinsip *good governance*, dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Kemala (2011) juga meneliti tentang pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik, hasil penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern.

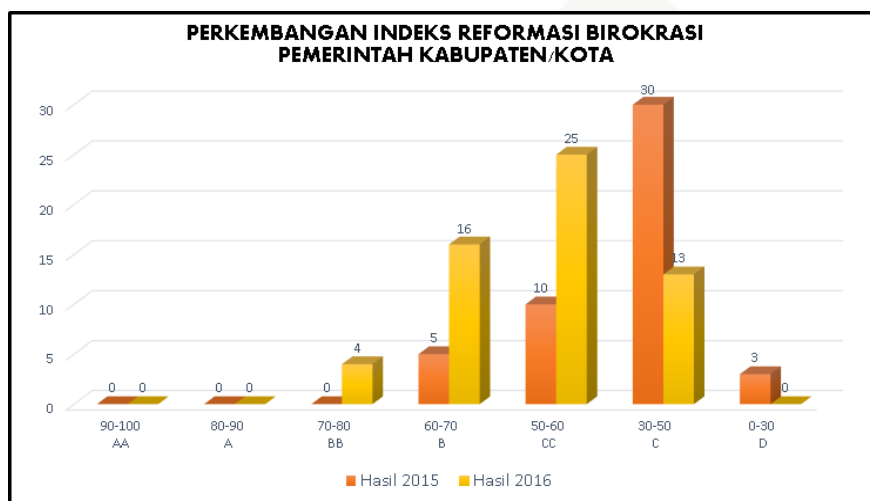
LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Dari beberapa hasil penelitian dan laporan AKIP, masalah kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik itu sangat penting dalam menyatakan manfaat dan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi selama ini (Kusumaningrum, 2010).

Fenomena lainnya yang berkaitan ialah Laporan Hasil Evaluasi Nasional RB 2016 (LHEN-RB 2016), tren perkembangan reformasi birokrasi pada tahun 2016 rata-rata mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, semakin tinggi nilai RB suatu organisasi, berarti pemerintah menjadi lebih

efektif, efisien, bersih dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)).

**Gambar 1.1**

### Indeks Reformasi Birokratis



*Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang SDM Aparatur tahun 2015-2016*

Dari indeks reformasi birokratis diatas dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian /lembaga telah mulai membaik. Hal ini yang menunjukkan trend positif antara lain penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang ditandai dengan upaya dari penerimaan pegawai yang transparan dan bersih dari KKN, dan peningkatan kompetensi pegawai. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan telah diupayakan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Namun pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang masih lemah antara lain: banyaknya peraturan daerah yang masih tumpang tindih dan kontra produktif terhadap pembangunan daerah, sistem pengawasan internal belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan serta upaya penataan organisasi belum menunjukkan bahwa organisasi tetap ukuran, sehingga organisasi yang dibentuk cenderung tidak efisien. sedangkan kabupaten kampar tidak bergeser dari predikat CC (Cukup), jadi peneliti ingin mengaplikasikan hal ini supaya predikat kabupaten kampar akan meningkat atau mengalami perkembangan daripada tahun-tahun sebelumnya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten/kota tahun 2017 menunjukkan kurang optimalnya beberapa aparatur instansi dalam pencapaian kinerjanya masing-masing. Salah satu permasalahannya adalah kompetensi penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Kompetensi menyangkut kemampuan individu dalam melaksanakan tugas atau menentukan keputusan sesuai dengan peran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap produktifnya. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para birokrat selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan birokrasi di pemerintahan dan mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas (Gede Ary, 2015).

Selain *Good Governanace* dan Kompetensi, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dan pengendalian akuntansi yang baik baik. (Kusumaningrum,2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbasis akuntansi atau sering disebut sistem pengendalian akuntansi. Dan didalam penelitian indraswari (2010),menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini, yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan, dan prosedur monitoring yang didasarkan informasi. Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar secara umum mempunyai pegawai negeri sipil (PNS) yang dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu sekretariat daerah, dinas dan badan/Inspektorat /kantor/ unit organisasi. Dari beberapa bagian kelompok, peneliti mengambil Inspektorat sebagai obyek penelitian. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan fungsi Inspektorat meliputi: perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Lebih lanjut (Albertus Yosep, 2017 ) mengatakan bahwa Inspektorat Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kewenangan yang secara tegas harus mengawal jalannya praktek pemerintahan, sehingga bias mencegah dan mendeteksi penyelewengan oleh aparat pemerintah melalui pengawasan yang optimal.

Berdasarkan penelitian Ira Amelia, Nur Azlina (2014) disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel valid, reliabel dan full clasic asumsi. Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa *Good Governance* dan *Internal Control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi Pembaruan Pemerintah Daerah mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Penerapan Akuntabilitas Keuangan mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Kepatuhan terhadap Hukum tidak mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penelitian Eko Setiawan (2013) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendali akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan tidak mempengaruhi kinerja pertanggungjawaban instansi pemerintah. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 96,4%. 3,6% berarti ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Reni Yulianti (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran variabel, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Penelitian Rizka Fahrul Rozi (2012) Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku berpengaruh terhadap akuntabilitas dengan 0,000 signifikansi, informasi pemanfaatan teknologi memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan 0,000 signifikansi, pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas dengan 0,005 signifikansi dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas dengan signifikansi 0,000.

Penelitian Febriani (2016) yang meneliti tentang “Pengaruh *Good Governance*, Kompensasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance*, Kompensasi, Komitmen Organisasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel *Good Governance*, Komitmen Organisasi, dan Motivasi secara parsial berpengaruh signifikan, tetapi Kompensasi dan Lingkungan Kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini memahami replikasi dari penelitian Febriani (2016) Dimana perbedaan penelitian ini adalah mengganti variabel Kompensasi, Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Lingkungan Kerja menjadi Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi yang didukung juga oleh penelitian Rizka Fahrul Rozi (2012) .

Dari fenomena dan penelitian sebelumnya peneliti menemukan masalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masih rendah dan tata kelola yang kurang baik. Menanggapi fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variabel dengan fenomena yang ada saat ini. Berdasarkan alasan diatas penelitian ini diberikan judul : **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, KOMPETENSI DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( Pada Inspektorat Daerah Kab. Kampar )”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Good Governance* pada Inspektorat Kab. Kampar berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?
2. Apakah Kompetensi pada Inspektorat Kab. Kampar Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?
3. Apakah Pengendalian Akuntansi pada Inspektorat Kab. Kampar berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah *Good Governance*, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Good Governance* pada Inspektorat Kab. Kampar berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui Kompetensi pada Inspektorat Kab. Kampar Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk mengetahui Pengendalian Akuntansi pada Inspektorat Kab.Kampar berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Untuk mengetahui *Good Governance*, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan terutama dalam *Good Governance* yang lebih baik, berkompetensi, dan pengendalian akuntansi dan untuk memonitoring (pengawasan) disuatu instansi pemerintah guna untuk menunjang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berguna bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang *Good Governance*, Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi pengaruhnya terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Sebagai referensi oleh pihak lain dalam penulisan skripsi dengan topik yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh *Good Governance*, Kompetensi Dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimasa akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisaan

Dalam penulisan proposal ini, adapun sistematika penyajiannya sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan pembahasan, hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dan perumusan hipotesis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskriptif objek penelitian, seluruh proses dan teknik analisis data hingga hasil pengujian dan seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan tentang keterbatasan dan saran untuk penelitian penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.